



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**BAB 5**  
**PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) DAN RENCANA AKSI**

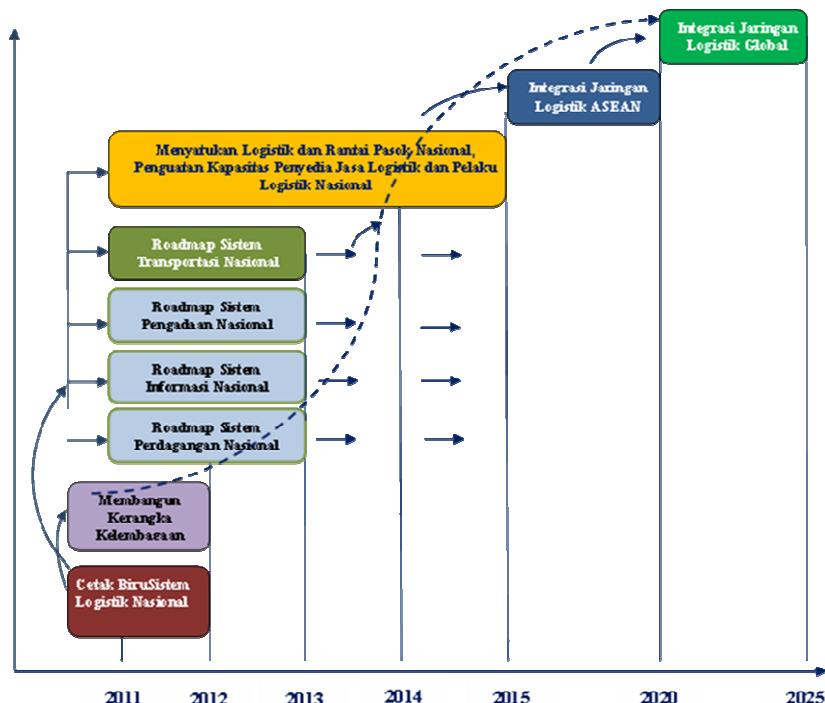
Sesuai dengan strategi dan program sebagaimana diuraikan pada Bab 4 maka disusun Peta Panduan (*Road map*) yang berupa tahapan dan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Sistem Logistik Nasional sebagaimana diuraikan pada Bab 3, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tahapan implementasi dan rencana aksi.

**A. ROAD MAP**

Tahapan pengembangan Sistem Logistik Nasional dilakukan melalui suatu tahapan transformasi yang efektif dan berkelanjutan, dimana proses transformasi ini dituangkan ke dalam tahapan implementasi (*miles stone*) dan rencana aksi. Adapun rentang waktu implementasinya adalah mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2025.

**1. PENTAHAPAN DAN TRANSFORMASI**

Penetapan target pengembangan didasarkan pada arah pengembangan, visi, misi dan tujuan sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab 3, serta strategi dan program yang telah diuraikan pada Bab 4. Adapun pentahapan pengembangan secara sistematis disajikan pada Gambar 5.1.



**Gambar 5.1. *Road Map* Cetak Biru Sistem Logistik Nasional**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

## 2. SASARAN PENGEMBANGAN 2011 - 2025

### a) PERIODE 2011-2015: PENGUATAN SISTEM LOGistik DOMESTIK

Sasaran yang ingin dicapai pada periode 2011–2015 adalah meletakkan dasar yang kokoh bagi terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai visi *Locally Integrated* dan mewujudkan landasan yang memadai untuk terkoneksi dengan jejaring logistik ASEAN. Indikator utama pencapaian sasaran ini adalah rasio biaya logistik nasional terhadap GDP tahun 2015 turun sebesar 3 (tiga) persen dari tahun 2011, dan skor *Logistik Perfomance Index (LPI)* Indonesia menjadi sebesar 3,1 (tiga koma satu).

### b) PERIODE 2016-2020 : INTEGRASI JEJARING LOGistik ASEAN

Sasaran yang ingin dicapai pada periode 2016–2020 adalah memperkokoh integrasi logistik dalam negeri, sinkronisasi, koordinasi dan interkoneksi dengan jejaring logistik ASEAN, dan meletakkan landasan yang kokoh untuk terkoneksi dengan jejaring logistik global dalam rangka mencapai visi *Globally Connected*. Indikator utama pencapaian sasaran ini adalah rasio biaya logistik nasional terhadap GDP tahun 2020 turun sebesar 4 (empat) persen dari tahun 2015, dan skor LPI Indonesia naik menjadi 3,3 (tiga koma tiga).

### c) PERIODE 2021 -2025 : INTEGRASI JEJARING LOGistik GLOBAL

Sasaran yang ingin dicapai pada periode 2021–2025 adalah beroperasinya Sistem Logistik Nasional secara efektif dan efisien yang terkoneksi dengan jejaring logistik global. Indikator utama pencapaian sasaran ini adalah rasio biaya Logistik Nasional terhadap GDP tahun 2025 turun sebesar 5 (lima) persen dari tahun 2020, dan skor LPI Indonesia naik menjadi 3,5 (tiga koma lima).

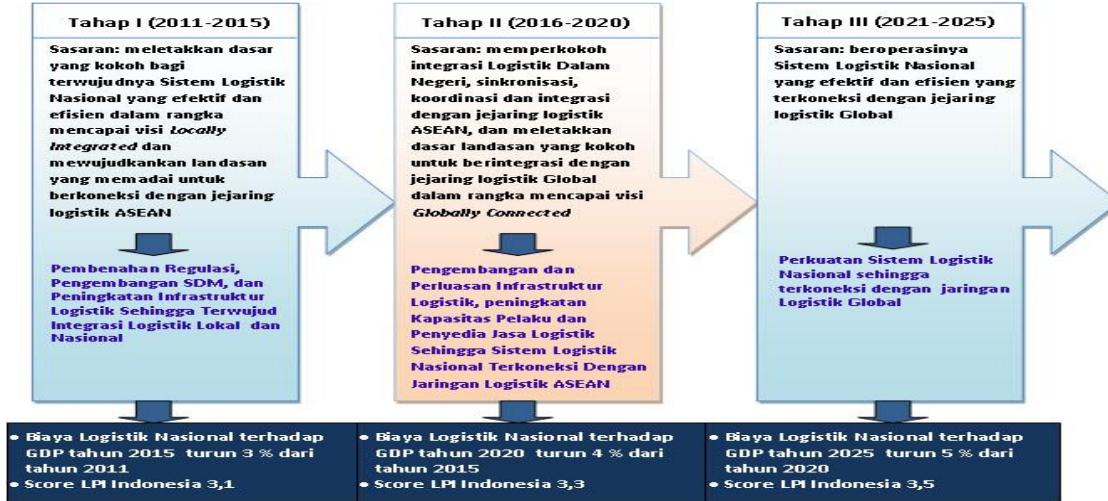
## B. TAHAPAN IMPLEMENTASI

Implementasi pengembangan Sistem Logistik Nasional tahun 2011-2025 dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sebagaimana disajikan pada Gambar 5.2 dan pada Tabel 5.1 berikut.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -



**Gambar 5.2 Tahapan Pengembangan Sistem Logistik Nasional**

**Tabel 5.1. Mile Stone Tahapan Implementasi**

Kinerja/Key Driver	Tahap I (2011-2015)	Tahap II (2016-2020)	Tahap III (2021-2025)
Komoditas Penggerak Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Pusat Distribusi Regional Komoditas pokok dan Strategis pada setiap Koridor Ekonomi</li> <li>• Revitalisasi dan pengembangan jejaring rantai pasok komoditas ekspor</li> <li>• Meningkatnya efektivitas pengoperasian <i>dry port</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Pusat Distribusi Propinsi Komoditas pokok dan strategis di Propinsi Konsumen</li> <li>• Terbangunnya jejaring rantai pasok dengan mitra dagang Indonesia</li> <li>• Terwujudnya Inland FTA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beroperasinya secara efektif jaringan Logistik Penyangga Komoditas pokok dan Strategis pada setiap koridor ekonomi</li> <li>• Efektif dan efisiennya jaringan rantai pasok global komoditas ekspor</li> <li>• Dominasi <i>term of trade</i> FOB untuk impor dan CIF untuk ekspor</li> </ul>
Pelaku Logistik (PL) dan Penyedia jasa Logistik (P JL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disetiap Koridor Ekonomi terdapat PL dan PJL yang menjadi pemain lokal dan nasional yang handal dan berdaya saing</li> <li>• Disetiap koridor ekonomi terdapat UKM dan koperasi penyedia jasa logistik sebagai pemain lokal dan nasional yang handal dan berdaya saing</li> <li>• Meningkatnya peran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disetiap Koridor Ekonomi terdapat PL dan PJL yang menjadi pemain handal regional</li> <li>• Disetiap Propinsi terdapat UKM dan koperasi penyedia jasa logistik sebagai pemain lokal dan nasional yang handal dan berdaya saing</li> <li>• Terwujudnya BUMN PJL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya PL dan PJL Nasional klas dunia (<i>world class player</i>)</li> </ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

Kinerja/Key Driver	Tahap I (2011-2015)	Tahap II (2016-2020)	Tahap III (2021-2025)
	<p>BUMN PJL (Pos, BGR, Bulog, dll) dalam Logistik pedesaan dan nasional</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Revitalisasi BUMN Niaga sebagai <i>trading house</i> komoditas pokok dan strategis serta komoditas ekspor</li></ul>	<p>sebagai pemain andalan dalam logistik pedesaan dan nasional</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Terwujudnya BUMN Niaga sebagai <i>trading house</i> kelas dunia (<i>world class player</i>)</li></ul>	
Infrastruktur Transportasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ditetapkan dan selesainya rancangan rinci pelabuhan hub laut internasional untuk Kawasan Timur Indonesia di Bitung, dan untuk Kawasan Barat Indonesia di Kuala Tanjung</li><li>• Ditetapkannya pelabuhan hub udara internasional di Jakarta, Kuala Namu, dan Makasar.</li><li>• Beroperasinya model sistem pelayanan 24/7 kargo udara di Bandara Soekarno Hatta</li><li>• Terwujud dan beroperasi secara terjadwal jalur pelayaran <i>short sea shipping</i> (SSS) di jalur Pantura dan Lalintim Sumatera untuk menggalakkan transportasi laut sebagai <i>backbone</i> transportasi nasional</li><li>• Meningkatnya peran KA untuk menangani angkutan barang jarak jauh di Jawa dan Sumatera</li><li>• Meningkatnya sinergi dan efektivitas angkutan truk, angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam mewujudkan sistem</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dibangunnya pelabuhan hub laut internasional untuk Kawasan Timur Indonesia di Bitung, dan untuk Kawasan Barat Indonesia di Kuala Tanjung</li><li>• Pengembangan pelabuhan kargo udara di Manado, Bali, Balikpapan, Morotai, dan Biak.</li><li>• Beroperasinya model sistem pelayanan 24/7 kargo udara di bandara utama</li><li>• Terbangun dan beroperasi secara efektif dan efisien jaringan transportasi laut antar pulau dalam rangka mewujudkan transportasi laut sebagai <i>backbone</i> transportasi nasional</li><li>• Terbangunnya Trans Java dan Trans Sumatera, serta Jalur KA yang menghubungkan antara pusat produksi dan simpul transportasi</li><li>• Meningkatnya peran angkutan truk angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai bagian dari angkutan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terintegrasinya secara efektif pelabuhan hub laut internasional dengan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpulan serta pusat pertumbuhan ekonomi;</li><li>• Beroperasinya secara efektif dan efisien pelabuhan kargo udara internasional</li><li>• Transportasi laut beroperasi secara efektif dan telah berfungsi sebagai <i>backbone</i> transportasi nasional</li><li>• Beroperasinya secara efektif KA sebagai pilihan utama transportasi barang di Indonesia</li><li>• Angkutan truk, angkutan sungai, danau dan penyeberangan berperan sebagai bagian integral dari</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

Kinerja/Key Driver	Tahap I (2011-2015)	Tahap II (2016-2020)	Tahap III (2021-2025)
	<p>angkutan multi moda</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Terbangunnya terminal multimoda dan pusat-pusat logistik (<i>logistics centers</i>) di bandar udara utama dan pelabuhan laut utama di setiap koridor ekonomi</li></ul>	<p>multi moda disetiap koridor ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Terbangun dan terkoneksi jaringan transportasi multi moda antar pelabuhan hub internasional, pelabuhan laut utama, bandar udara utama, pusat-pusat pertumbuhan dan <i>dry port</i></li></ul>	<p>sistem angkutan multi moda dalam rangka mewujudkan konektivitas lokal dan nasional</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Terwujudnya jaringan transportasi multi moda yang menghubungkan simpul simpul logistik</li></ul>
Infrastruktur TIK	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbangunnya sistem otomasi dan informasi logistik nasional yang terintegrasi secara elektronik (INALOG)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beroperasinya INALOG yang terkoneksi dengan jaringan logistik regional ASEAN</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terintegrasinya e-Logistik Nasional ke dalam jaringan logistik global</li></ul>
Manajemen SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tertata dan terselenggaranya sistem pendidikan dan pelatihan profesi logistik nasional yang berstandar internasional</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sebagian besar pekerja logistik di Indonesia sudah mendapat sertifikasi logistik nasional yang berstandar internasional dan atau memiliki ijazah/sertifikat dalam bidang yang terkait dengan logistik dari institusi yang terakreditasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Semua pekerja logistik di Indonesia sudah mendapat sertifikasi logistik nasional yang berstandar internasional dan atau memiliki ijazah/sertifikat dalam bidang yang terkait dengan logistik dari institusi yang terakreditasi</li></ul>
Regulasi dan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sinkronisasi regulasi dan kebijakan logistik nasional untuk mendorong efisiensi kegiatan ekspor impor</li><li>• Penguatan pelaksanaan regulasi dan kebijakan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sinkronnya regulasi dan kebijakan antar sektor dan antar wilayah (pusat, daerah, dan antar daerah)</li><li>• Penegakan regulasi dan kebijakan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terwujudnya peraturan perundangan yang terunifikasi (UU Logistik Nasional) yang menjamin kelancaran arus barang secara efisien baik domestik maupun internasional</li><li>• Regulasi dan kebijakan logistik nasional terselenggara secara efektif</li></ul>
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbentuknya Tim Kerja Logistik Nasional sebagai</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya peran Institusi/Kelembagaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbentuknya institusi permanen</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

Kinerja/Key Driver	Tahap I (2011-2015)	Tahap II (2016-2020)	Tahap III (2021-2025)
	<p>pengawas pelaksanaan Cetak Biru Sislognas dan <i>Damage Control Unit</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya peran, koordinasi dan sinergi inter dan antara asosiasi dan <i>stakeholder</i> logistik ditingkat lokal dan nasional</li></ul>	<p>Logistik pada level Nasional dan ASEAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya peran, koordinasi dan sinergi inter dan antar asosiasi dan <i>stakeholder</i> logistik di tingkat Regional dan Global</li></ul>	<p>yang menangani dan mengkoordinasikan Sistem Logistik Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya peran, koordinasi dan sinergi inter dan antar asosiasi dan <i>stakeholder</i> logistik ditingkat regional dan global</li></ul>

### 1. JANGKA MENENGAH I (2011 – 2015)

Rencana implementasi pada kurun waktu (2011-2015) difokuskan pada penguatan Sistem Logistik Dalam Negeri (domestik) yang berbasis pada pembentahan dan pengembangan 6 (enam) faktor penggerak utama Sistem Logistik Nasional meliputi: pembentahan sistem logistik dan rantai suplai komoditas penggerak utama, penguatan pelaku dan penyedia jasa logistik, teknologi infomasi dan komunikasi, dan pembentahan regulasi dan kebijakan. Ruang lingkup dan sasaran selama kurun waktu 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- a) Komoditas penggerak utama, difokuskan pada terwujudnya Pusat Distribusi Regional komoditas pokok dan strategis pada setiap koridor ekonomi; revitalisasi dan pengembangan jejaring rantai pasok komoditas ekspor; dan meningkatnya efektivitas pengoperasian *dry port*;
- b) Pelaku logistik (PL) dan penyedia jasa logistik (PJL), diarahkan kepada pemberdayaan dan penguatan pelaku dan penyedia jasa logistik, penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku dan penyedia jasa logistik, dan mendorong partisipasi swasta dalam investasi di bidang logistik sehingga disetiap koridor ekonomi terdapat PL dan PJL lokal menjadi andalan nasional; dan terdapat UKM dan koperasi penyedia jasa logistik sebagai pemain lokal dan nasional yang handal dan berdaya saing. Selain itu diharapkan BUMN menjadi salah satu penggerak dalam pelaksanaan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional dengan meningkatnya peran BUMN PJL (Pos, BGR, Bulog, dan sebagainya) dalam logistik pedesaan dan nasional, dan revitalisasi BUMN Niaga sebagai *trading house* komoditas pokok dan strategis serta komoditas ekspor;
- c) Infrastruktur transportasi, dititikberatkan kepada tercapainya sasaran antara lain: selesainya rancangan rinci pelabuhan hub laut internasional di Kawasan Timur Indonesia di Bitung dan Kawasan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

Barat Indonesia di Kuala Tanjung dan ditetapkannya pelabuhan hub udara international di Jakarta, Kuala Namu, dan Makasar; beroperasinya model sistem pelayanan 24/7 kargo udara di Bandara Soekarno Hatta; terwujud dan beroperasi secara terjadwal jalur pelayaran *short sea shipping* (sss) di jalur Pantura dan Lalintim Sumatera untuk menggalakkan transportasi laut sebagai *backbone* transportasi nasional; meningkatnya peran Kereta Api untuk menangani angkutan barang jarak jauh di Jawa dan Sumatera (di atas 200 kilo meter); dan meningkatnya sinergi dan efektivitas angkutan truk, angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam mewujudkan sistem angkutan multi moda;

- d) Teknologi informasi dan komunikasi, diarahkan pada terbangunnya sistem otomasi dan informasi logistik nasional yang terintegrasi secara elektronik (INALOG)
- e) Pengembangan SDM logistik diarahkan kepada tertata dan terselenggaranya sistem pendidikan dan pelatihan profesi logistik nasional yang berstandar internasional untuk menciptakan profesional di bidang logistik bertaraf internasional melalui pengembangan lembaga pendidikan akademik dan vokasi, serta sertifikasi profesi.
- f) Pembenahan regulasi dan kebijakan, di arahkan kepada sinkronisasi regulasi dan kebijakan Logistik Nasional antar Pusat dan Derah, dan antar Kementerian/Lembaga, antara lain pada bidang usaha dan perdagangan dalam negeri dan luar negeri (ekspor dan impor), infomasi dan transaksi elektronik, dan transportasi multi moda, serta SDM. Selain itu dilakukan pula penguatan penegakan pelaksanaan regulasi dan kebijakan.

Kelembagaan, diarahkan untuk meningkatkan tata kelola Sistem Logistik Nasional baik dari sisi regulator maupun operator dan pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional dikoordinasikan oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (KP3EI) yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Untuk membantu pelaksanaan tugas KP3EI tersebut, dibentuk Tim Kerja Logistik. Tim Kerja dimaksud bertugas untuk mengkoordinasikan dan memonitor Pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional dan sebagai *Damage Control Unit*. Disamping itu Tim Kerja juga bertugas melaporkan perkembangan pelaksanaan Pengembangan Sistem Logistik Nasional, termasuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan terkait logistik serta hambatan pelaksanaan Pengembangan Sistem Logistik Nasional baik yang bersifat lintas sektor maupun lintas wilayah. Hal ini dimaksudkan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

agar pelaksanaan Pengembangan Sistem Logistik Nasional dapat berjalan efektif dan peran, koordinasi dan sinergi inter dan antara asosiasi dan stakeholder logistik ditingkat lokal dan nasional semakin meningkat.

## 2. JANGKA MENENGAH II (2016 – 2020)

Rencana implementasi pada kurun waktu 2016–2020 difokuskan pada penguatan sarana dan prasarana logistik baik infrastuktur transportasi maupun teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan kapasitas pelaku dan penyedia jasa logistik, dan konektivitas sistem logistik nasional kedalam jejaring logistik regional ASEAN. Ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan dan sasaran selama kurun waktu 2016–2020 adalah sebagai berikut:

- a) Komoditas Penggerak Utama, diarahkan pada terwujud Pusat Distribusi Propinsi komoditas pokok dan strategis di Propinsi Konsumen, dan terbangunnya jejaring rantai pasok komoditas dengan mitra dagang Indonesia, serta terwujudnya *Inland FTA*. Propinsi Konsumen adalah propinsi bukan penghasil komoditas sehingga memerlukan pasokan komoditas dari propinsi lainnya.
- b) Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik, diarahkan agar disetiap koridor ekonomi terdapat PL dan PJL yang menjadi pemain handal regional melalui upaya peningkatan kapasitas layanan perusahaan jasa logistik BUMN dan swasta berstandar internasional; dan disetiap Propinsi terdapat UKM dan koperasi penyedia jasa logistik sebagai pemain lokal dan nasional yang handal dan berdaya saing, serta terwujudnya BUMN PJL sebagai pemain andalan dalam logistik pedesaan dan nasional dan BUMN Niaga sebagai *trading house* klas dunia (*world class player*).
- c) Infrastruktur Transportasi, diarahkan kepada terbangunnya pelabuhan hub laut internasional di Kawasan Timur Indonesia di Bitung, dan Kawasan Barat Indonesia di Kuala Tanjung; Pengembangan pelabuhan kargo udara di Manado, Bali, Balikpapan, Morotai, dan Biak; Beroperasinya model sistem pelayanan 24/7 kargo udara di bandara utama; Terbangun dan beroperasi secara efektif dan efisien jaringan transportasi laut antar pulau dalam rangka mewujudkan transportasi laut sebagai *backbone* transportasi nasional; Terbangunnya Trans Java dan Trans Sumatera, serta Jalur Kereta Api yang menghubungkan antara pusat produksi dan simpul transportasi; Meningkatnya peran angkutan truk angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai bagian dari angkutan multi moda disetiap koridor ekonomi; dan terbangun dan terkoneksinya jaringan transportasi multi moda antar pelabuhan hub internasional, pelabuhan laut utama, bandar udara utama, pusat-pusat pertumbuhan dan *dry port*.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

- d) Teknologi Informasi dan Komunikasi, difokuskan pada terbangun dan beroperasinya e-Logistik Nasional (INALOG) yang terkoneksi dengan Jaringan Logistik ASEAN sehingga terwujud koneksi logistik regional melalui pembangunan protokol integrasi IT logistik secara nasional dan mengembangkan *paperless system* dalam pengelolaan sistem logistik nasional yang terkoneksi dengan jejaring logistik ASEAN, dan pengembangan jejaring infrastruktur informasi logistik nasional dan logistik ASEAN.
- e) Pengembangan SDM Logistik, diarahkan agar sebagian besar pekerja logistik di Indonesia memiliki sertifikasi logistik nasional yang berstandar internasional dan atau memiliki ijazah dalam bidang yang terkait dengan logistik dari institusi pendidikan yang terakreditasi secara nasional dan internasional.
- f) Regulasi dan Kebijakan, dititik beratkan kepada sinkronisasi regulasi dan kebijakan antar sektor dan antar wilayah (pusat, daerah, dan antar daerah) dan penegakan (*law enforcement*) regulasi dan kebijakan yang terkait dengan logistik.
- g) Kelembagaan, dititik beratkan pada meningkatnya peran Institusi/Kelembagaan Logistik secara aktif pada level nasional dan ASEAN, dan meningkat pula peran koordinasi dan sinergi inter dan antar asosiasi dan *stakeholder* logistik di tingkat ASEAN.

### 3. JANGKA PANJANG (2021 – 2025)

Rencana implementasi pada kurun waktu (2021–2025) difokuskan pada integrasi Sistem Logistik Nasional dalam skala domestik dan global sehingga terwujud koneksi global. Ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan dan sasaran selama kurun waktu 2020-2025 adalah sebagai berikut:

- a) Komoditas Penggerak Utama, diarahkan pada beroperasinya secara efektif Jaringan Logistik Penyangga komoditas pokok dan strategis pada setiap koridor ekonomi, dan beroperasinya secara efektif dan efisien jaringan rantai pasok global komoditas unggulan ekspor sebagaimana tercantum dalam MP3EI, dan diberlakukannya secara dominan *term of trade* FOB untuk impor dan CIF untuk ekspor.
- b) Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik, diarahkan agar PL dan PJL Nasional disetiap koridor telah menjadi pemain global (*world class player*).
- c) Infrastruktur Transportasi, diarahkan agar pelabuhan hub laut internasional terintegrasi secara efektif dengan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpulan serta pusat pertumbuhan ekonomi; Pelabuhan Kargo Udara Internasional telah beroperasi secara efektif dan efisien; Transportasi Laut beroperasi dan telah berfungsi sebagai *backbone* transportasi nasional; Angkutan Kereta Api telah menjadi pilihan utama untuk transportasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

barang; Sejalan dengan itu, angkutan truk, angkutan sungai, danau dan penyeberangan berperan sebagai bagian integral dari sistem angkutan multi moda dalam rangka mewujudkan konektivitas lokal dan nasional; serta telah terwujudnya jaringan transportasi multi moda yang menghubungkan simpul simpul logistik.

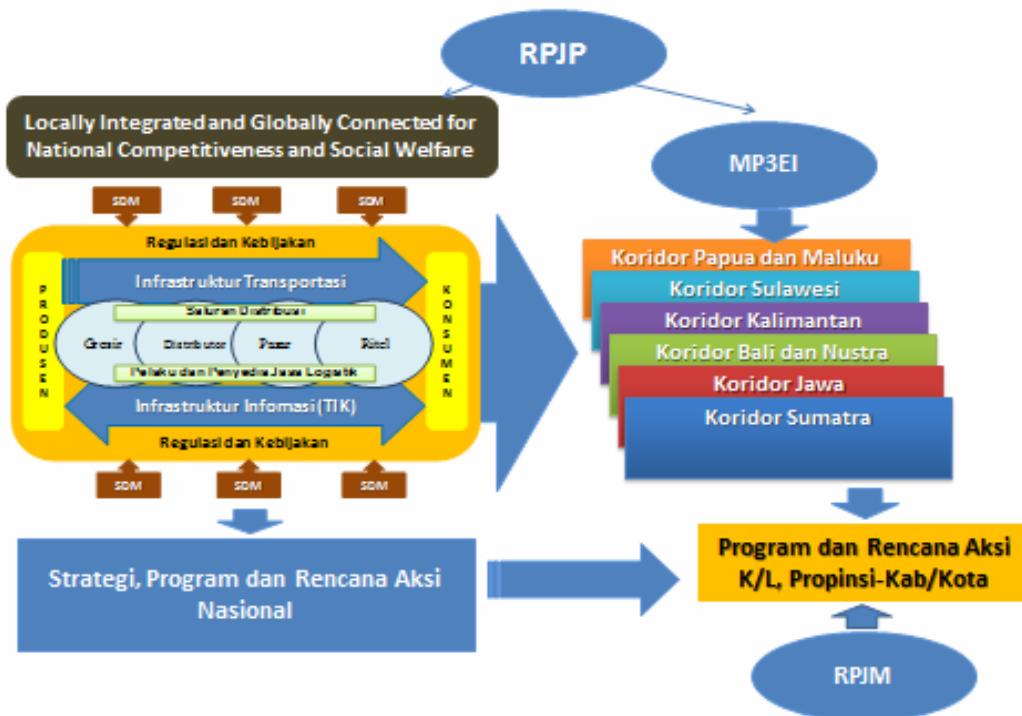
- d) Infrastruktur TIK, diarahkan agar terintegrasinya e-Logistik Nasional ke dalam jaringan logistik global sehingga terwujud konektivitas logistik global, melalui “*Nasional Business Single Gateway*”.
- e) Pengembangan SDM Logistik, diarahkan agar semua pekerja logistik di Indonesia sudah mendapat sertifikasi logistik yang berstandar internasional dan atau memiliki ijazah dalam bidang yang terkait dengan logistik yang terakreditasi.
- f) Regulasi dan Kebijakan, dititikberatkan pada terwujudnya peraturan perundungan yang terunifikasi (Undang-Undang Logistik Nasional) yang menjamin kelancaran arus barang secara efisien baik domestik maupun internasional; dan regulasi dan kebijakan logistik nasional terselenggara secara efektif.
- g) Kelembagaan, diarahkan kepada terbentuknya institusi permanen yang menangani dan mengkoordinasikan Sistem Logistik nasional; dan meningkatnya peran, koordinasi dan sinergi inter dan antar asosiasi dan *stakeholder* logistik ditingkat regional dan global;

Selanjutnya kerangka implementasi Cetak Biru Sistem Logistik Nasional disajikan pada Gambar 5.3 berikut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -



**Gambar 5.3. Kerangka Implementasi Cetak Biru Sislognas**

### C. RENCANA AKSI

Sesuai strategi sebagaimana diuraikan pada Bab 4 dan sasaran pencapaian target sebagaimana telah diuraikan pada butir A diatas, maka disusun Rencana Aksi Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang dikelompokkan atas 6 (enam) faktor penggerak utama logistik nasional. Mengingat dinamika yang sangat tinggi maka berikut ini adalah rencana aksi periode pertama untuk kurun waktu 4(empat) tahun mendatang dari 2011-2015. Pada akhir periode, akan dilakukan penyusunan rencana aksi untuk periode berikutnya (2016-2020) yang merupakan kelanjutan dari rencana aksi dan hasil yang telah dicapai pada periode 2011-2015.

#### 1. RENCANA AKSI KOMODITAS PENGERAK UTAMA

Sesuai dengan sasaran dan strategi sebagaimana telah diuraikan pada Bab 4 dan pencapaian sasaran periode 2011-2015, Rencana Aksi komoditas penggerak utama diklasifikasikan atas komoditas strategis dan komoditas unggulan ekspor, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1. sebagai berikut :

**Tabel 5.1. Rencana Aksi Komoditas Penggerak Utama**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
1.	Membangun sistem logistik nasional komoditas pokok dan strategis	1. Terbangunnya jaringan logistik penyangga komoditas pokok dan strategis di setiap koridor ekonomi  2. Terbangunnya sistem manajemen rantai pasok untuk komoditas pokok dan strategis di setiap koridor ekonomi.	2012-2015  2012-2015	<b>Kemendag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kementan</li><li>• Kemenperin</li><li>• KemenPPN/- Bappenas</li><li>• Kemenkes</li></ul> <b>Kemendag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenkes</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kementan</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemenkeu</li><li>• KemenPPN/- Bappenas</li></ul>
		3. Tertatanya pelaku sistem rantai pasok komoditas pokok dan strategis (Eksportir; Importir, Pedagang Besar, Distributor, Grosir, Agen, Pengecer, dsb) di setiap koridor ekonomi	2012-2015	<b>Kemendag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementan</li><li>• Kemen. ESDM</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenkes</li></ul>
		4. Terbangun logistik pasar tradisional baik prasarana, sarana, maupun manajemennya.	2012-2015	<b>Kemendag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen PU</li><li>• Kementan</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemendagri</li></ul>
		5. Terbangunnya <i>logistics center</i> untuk melayani <i>consolidated container</i> bagi <i>LCL cargo</i> eksportir UKM	2013-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
6.	Meningkatkan kemampuan sistem logistik nasional dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan nasional komoditas pokok dan strategis	1. Meningkatnya produksi nasional komoditas pokok dan strategis yang masih diimpor  2. Terbangun dan meningkatnya pasokan/produksi di wilayah Indonesia timur untuk menyeimbangkan pasokan antar wilayah barat dan timur	2012-2015  2012-2015	<b>Kemenko- Ekon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementan</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenkes</li><li>• Pemda</li></ul> <b>Kemenko- Ekon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementan</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemendag</li><li>• KemenPPN/- Bappenas</li><li>• Kemendagri</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
				<ul style="list-style-type: none"><li>• KemenPU</li><li>• Kemen PDT</li><li>• Pemda</li></ul>
		3. Terjaminnya ketersediaan pasokan bahan baku yang digunakan untuk produksi komoditas pokok dan strategis (minyak goreng, terigu, bahan bakar/energi, pakan ternak, bahan baku obat, semen, baja, pupuk, dsb)	2012-2015	<b>Kemenko-Ekon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementan</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemendagri</li><li>• KemenPPN/-Bappenas</li><li>• Kemenkes</li></ul>
		4. Meningkatnya peran pelaku produsen nasional dalam penyediaan komoditas pokok dan strategis	2012-2015	<b>Kemenko-Ekon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendagri</li><li>• Kementan</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-KP</li><li>• Kemenhut</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemen-BUMN</li><li>• Kemenkes</li><li>• BPOM</li><li>• BSN</li></ul>
		5. Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan dan penyaluran komoditas pokok dan strategis untuk kebutuhan masyarakat	2012-2015	<b>Kemendagri</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kementan</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenko Ekon</li><li>• Kemen PU</li><li>• Kemenkes</li></ul>
7.	Menurunkan disparitas harga komoditas pokok dan strategis baik antar waktu dan antar daerah.	1. Berfungsiya aplikasi Sistem Pemantauan Pasar untuk pemantauan ketersediaan stok dan stabilisasi harga komoditi pokok dan strategis	2011-2015	<b>Kemendag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendagri</li><li>• Kementan</li><li>• Kemen KUKM</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemenkominfo</li></ul>
		2. Meningkatnya pemanfaatan sistem resi gudang untuk mendukung jaringan penyangga, pusat distribusi dan terminal agribisnis	2011-2015	<b>Kemendag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementan</li><li>• Kemen KUKM</li><li>• Kemen KP</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemen PPN/-Bappenas</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
8.	Meningkatkan Kinerja Sistem Rantai Pasok Komoditas Unggulan Ekspor	1. Terbangunnya jaringan rantai pasok komoditas unggulan ekspor sebagaimana tercantum dalam MP3EI	2012-2015	<b>Kemendag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementan</li><li>• Kemen KUKM</li><li>• Kemen KP</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemen ESDM</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li></ul>
		2. Terbentuknya rantai nilai dari hulu sampai ke hilir (hilirisasi) untuk menciptakan <i>sustainable trade</i>	2012-2015	<b>Kemendag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementan</li><li>• Kemen KUKM</li><li>• Kemen KP</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemen ESDM</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li></ul>
		3. Meningkatnya efektivitas fasilitasi perdagangan komoditas unggulan ekspor sehingga menurunkan biaya ekspor-impor, dan meningkatkan kelancaran ekspor-impor.	2012-2015	<b>Kemendag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemen PU</li><li>• Kemeneg BUMN</li><li>• KADIN</li></ul>
		4. Meningkatnya pasokan/produksi komoditas yang bernilai tambah tinggi.	2012-2015	<b>Kemenperin</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementan</li><li>• Kemen KUKM</li><li>• Kemen KP</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemen ESDM</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li></ul>
		5. Tumbuh dan berkembangnya diversifikasi jaringan rantai pasok komoditas unggulan ekspor di pasar non tradisional ( <i>emerging market</i> )	2012-2015	<b>Kemendag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenlu</li><li>• Kementan</li><li>• Kemen KP</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen ESDM</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

## 2. RENCANA AKSI PELAKU DAN PENYEDIA JASA LOGISTIK

Rencana Aksi Penyedia Jasa Logistik difokuskan kepada: 1) Pemberdayaan dan Penguatan Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik; 2) Peningkatan kapasitas Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik, 3) Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif bagi Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik; 3) Mendorong partisipasi swasta dalam investasi di bidang infrastruktur logistik, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.2. berikut

**Tabel 5.2. Rencana Aksi Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik**

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab& Inst. Terkait
1	Pemberdayaan dan penguatan Pelaku (PL) dan Penyedia Jasa Logistik (PJL)	1. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme perusahaan PL baik BUMN, Koperasi, maupun swasta, dan regulator baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah	2012-2015	<b>Kemenko-Ekon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemenkop&amp; UKM</li><li>• Pemda</li></ul>
		2. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme perusahaan PJL, baik BUMN, Koperasi, maupun swasta, dan regulator baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemenkop&amp; UKM</li><li>• Pemda</li></ul>
		3. Meningkatnya daya saing Pelaku Logistik Nasional (Produsen Pedagang Besar, Distributor, Grosir, Agen, Pengecer, dsb)	2012-2015	<b>Kemenko-Ekon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen BUMN</li></ul>
		4. Meningkatnya daya saing PJL Nasional (BUAM, <i>Forwarder, Shipping liner, Transporter, Warehouser</i> , dsb)	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemeneg BUMN</li><li>• Kemenkominfo</li></ul>
		5. Dikembangkannya Sistem Manajemen Pelabuhan Laut dan udara yang dikelola oleh BUMN dan terintegrasi dengan instansi CIQ ( <i>Custom, Immigration and Quarantine</i> ) untuk meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan efektivitas proses bisnis di Pelabuhan Laut dan Udara	2011-2015	<b>Kemen BUMN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkeu</li></ul>
		6. Disetiap Propinsi terdapat UKM dan koperasi penyedia jasa logistik sebagai pemain	2011-2015	<b>Kemenkop &amp;UKM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab& Inst. Terkait
		lokal dan nasional yang handal dan berdaya saing		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenperin</li><li>• Kemenkeu</li></ul>
		7. Sinergi BUMN untuk menciptakan <i>supply chain network</i> kelas dunia yang efisien dan efektif sehingga mampu mendorong peningkatan daya saing Perekonomian Nasional	2012-2015	<b>Kemen BUMN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kementan</li></ul>
		8. Perusahaan PJL Nasional ( <i>Freight forwarder / Shipping Line/ Transporter</i> , dsb) telah menjadi Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM)	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenkop&amp; UKM</li></ul>
2.	Peningkatan kapasitas Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik	1. Terbitnya kebijakan/ skema insentif (fiskal, moneter, perijinan, dsb) kepada Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik.	2011-2012	<b>Kemenko Ekon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkop&amp; UKM</li></ul>
		2. Terbitnya kebijakan untuk meningkatkan dukungan lembaga keuangan (perbankan, asuransi, dsb) kepada industri transportasi logistik, Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik	2011-2012	<b>Kemenko Ekon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkominfo</li></ul>
		3. Terbitnya kebijakan <i>institutional capacity building</i> bagi Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik	2011-2012	<b>Kemenko Ekon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendiknas</li><li>• Kemenakertrans</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkop&amp; UKM</li><li>• BNSP</li></ul>
3.	Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong partisipasi swasta dalam investasi dan penyelenggaraan di bidang logistik	1. Terbentuk Badan Sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM)	2011-2012	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen BUMN</li></ul>
		2. Terciptanya peluang usaha di dalam bidang logistik	2012-2015	<b>BKPM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen BUMN</li></ul>
		3. Tersedianya insentif fiskal dan kemudahan akses usaha bagi	2011-2015	<b>Kemenkeu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab& Inst. Terkait
		penyelenggara jasa logistik		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkop-UKM</li><li>• Kemen BUMN</li></ul>
4.	Meningkatkan efektivitas pelayanan	1. Tersusunnya standar, sistem mekanisme dan prosedur penyelenggaraan angkutan multimoda yang efisien untuk kelancaran arus barang dan penurunan biaya logistik	2011-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemeneg BUMN</li></ul>
		2. Terbangunnya sistem perijinan usaha secara elektronik ( <i>e-permit</i> ) yang cepat, tepat dan transparan	2011-2013	<b>Kemendagri dan BKPM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemenhub</li></ul>
		3. Meningkatnya peran organisasi asosiasi bidang logistik dalam upaya peningkatan pelayanan jasa logistik	2011-2012	<b>Kemendag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemenkop&amp;UKM</li></ul>
5	Penguatan dan perluasan jejaringan kerjasama internasional	1. Terfasilitasinya PL dan PJL dalam penguatan dan perluasan jejaring bisnis global	2011-2015	<b>Kemendag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemeneg BUMN</li><li>• Kemenkop&amp;UKM</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemlu</li></ul>

### 3. RENCANA AKSI INFARSTRUKTUR TRANSPORTASI

Rencana Aksi pembangunan dan pengembangan infrastruktur selama periode 2011-2015 diarahkan kepada: 1) pelabuhan utama (hub internasional); 2) angkutan laut, 3) angkutan sungai dan penyeberangan; 4) jalan; 5) kereta api (KA); 6) bandar udara dan angkutan udara, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3. berikut.

**Tabel 5.3. Rencana Aksi Infrastruktur Transportasi**

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
1.	Membangun konektivitas global dengan mengembangkan pelabuhan eksport-impor dan Pelabuhan Hub Internasional	1. Ditetapkannya pelabuhan hub internasional di Kawasan Timur Indonesia (Bitung, Makasar, Sorong) dan Kawasan Barat Indonesia di Kuala Tanjung	2011-2012	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
		2. Selesainya rancangan rinci <i>hub</i> Internasional Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
		3. Rancangan rinci inter koneksi antara pelabuhan hub internasional dengan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul	2013-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
		4. Meningkatnya kapasitas dan pelayanan Pelabuhan Ekspor Komoditas Agro dan Pertambangan disetiap koridor ekonomi 1, 3, 4, 5 dan 6.	2013-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
		5. Terbangun infrastruktur pendukung untuk pengembangan pelabuhan Dumai dan pelabuhan lain menjadi pelabuhan utama untuk komoditas berbasis <i>CPO</i> ( <i>Crude Palm Oil</i> )		<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li><li>• Kementan</li></ul>
		6. Terbangunnya <i>logistics center</i> untuk melayani <i>consolidated container</i> bagi LCL cargo eksportir UKM	2013-2015	<b>Kemenko Ekon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
2.	Membangun konektivitas antar pulau, dan nasional secara terintegrasi	1. Tertatinya Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, dan Pelabuhan Pengumpulan dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)	2013-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
		2. Terbangunnya pelabuhan yang mendukung distribusi komoditas pokok dan strategis, dan komoditas unggulan ekspor serta mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	2013-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
		3. Terbangunnya Pelabuhan	2012-2015	<b>Kemenhub</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
		Kalibaru sebagai Perluasan Pelabuhan Tanjung Priok		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
3.	Membangun konektivitas lokal, antar pulau, dan nasional secara terintegrasi	1. Terwujudnya jalur dan operasi pelayaran <i>short sea shipping</i> secara terjadwal	2013-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
		2. Meningkatnya aksesibilitas angkutan barang di daerah tertinggal/wilayah terpencil dan daerah padat (macet)	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
		3. Diberikannya insentif kepada Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik yang bergerak dalam jalur <i>short sea shipping</i> .	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
		4. Terbangunnya sistem pengangkutan untuk komoditas curah gas ( <i>gas bulk commodities</i> ) melalui sistem pipanisasi di daratan, yang meliputi jalur pipanisasi, sarana penyimpanan silo/depot, dan sarana pengangkutan masal ke <i>hinterland</i> .	2012-2015	<b>Kemen ESDM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
		5. Terbangunnya sistem pipanisasi angkutan untuk komoditas curah gas ( <i>gas bulk commodities</i> ) melalui jalur laut /perairan, meliputi sarana pengangkutan laut dan prasarana penyimpanan silo/depot di Pelabuhan Utama, serta sarana pengangkutan masal dari Pelabuhan ke <i>hinterland</i>	2012-2015	<b>Kemen ESDM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
		6. Terbangunnya sistem pengangkutan dan penyimpanan komoditas curah		<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/-</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
		kering ( <i>dry bulk commodities</i> ), yang meliputi terminal bongkar muat dan prasarana penyimpanan silo di Pelabuhan Utama, serta sarana pengangkutan masal dari Pelabuhan ke <i>hinterland</i>		Bappenas • Kemendag • Kementan • Kemenperin • Kemen-PU
		7. Terbangunnya sistem pengangkutan dan penyimpanan komoditas curah cair ( <i>liquid bulk commodities</i> ), yang meliputi terminal bongkar muat dan prasarana penyimpanan silo di Pelabuhan Utama, serta sarana pengangkutan masal dari Pelabuhan ke <i>hinterland</i>		<b>Kemenhub</b> • Kemen ESDM • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag • Kemenperin • Kemen-PU
4 .	Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pelabuhan	1. Ditetapkan dan ditingkatkannya kapasitas beberapa pelabuhan utama sebagai Pusat Distribusi Regional	2011-2012	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag • Kemenperin • Kemen-PU
		2. Meningkatnya efisiensi waktu angkut melalui pelabuhan-pelabuhan utama	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag • Kemenperin • Kemen-PU
		3. Penguatan dan ekspansi kapasitas pelabuhan untuk terminal hasil pertambangan, pertanian dan peternakan	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag • Kemenperin • Kemen-PU
		4. Terbangun dan berkembangnya pelabuhan perikanan yang berorientasi ekspor	2012-2015	<b>Kemen-KP</b> • Kemenhub • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag • Kemenperin • Kemen-PU
		5. Revitalisasi galangan kapal di Sorong, Ambon, dan Makasar	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag • Kemenperin
5	Memberlakukan	1. Terlaksananya azas <i>cabotage</i>	2011-2015	<b>Kemenhub</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
	azas <i>cabotage</i> untuk angkutan laut dalam negeri secara penuh sesuai jadwal <i>Roadmap</i>	untuk seluruh jenis barang/muatan, kecuali untuk penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir migas ( <i>offshore</i> ).  2. Terlaksananya azas <i>full cabotage</i> di perairan Indonesia (seluruh muatan angkutan laut dalam negeri diangkut oleh kapal berbendera Indonesia & dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional)		• Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag • Kemenperin • Kemen-PU
		3. Terwujudnya kemitraan kontrak jangka panjang antara pemilik barang dan pemilik kapal, melalui pemanfaatan informasi ruang kapal dan muatan sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2005.	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag • Kemenperin • Kemen-PU
		4. Terlaksananya Inpres Nomor 2 tahun 2009 terkait dengan kewajiban angkutan barang milik pemerintah diangkut oleh kapal berbendera Indonesia.	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag • Kemenperin • Kemen-PU
6.	Meningkatkan aksesibilitas angkutan barang di daerah tertinggal dan/atau wilayah terpencil, dan daerah padat (macet)	1. Berfungsinya secara baik pelabuhan pengumpulan, optimalisasi pelayaran perintis, dan mekanisme PSO;  2. Terbangunnya terminal antarmoda untuk mendukung optimalisasi angkutan perintis dalam mendukung kelancaran arus barang di daerah terpencil /belum berkembang.	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag • Kemenperin • Kemen-PU
		3. Meningkatnya jumlah armada kapal laut nasional untuk menunjang logistik barang antar pulau	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag • Kemenperin • Kemen-PU
		4. Terselenggaranya kapal ro-ro ( <i>short sea shipping</i> ) di sepanjang Pantai Utara Jawa dan Jalur Lintas Timur Sumatera sebagai alternatif	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
		utama angkutan barang untuk mengurangi beban jalan		• Kemenperin • Kemen-PU
		5. Berfungsinya secara regular angkutan perintis / <i>short sea shipping</i> untuk mendukung kelancaran arus barang di daerah terpencil / belum berkembang	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag • Kemenperin • Kemen-PU
7 .	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan angkutan laut secara terpadu	1. Terbangun dan berkembangnya pelayaran lintas laut/perairan di dalam 6 (enam) koridor ekonomi	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag • Kemenperin • Kemen-PU
		2. Meningkatnya produktivitas dengan memberikan jaminan pelayanan melalui penerapan <i>Service Level Agreement /Service Level Guarantee (SLA/SLG)</i> untuk Pelayanan Barang & Petikemas di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia.	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag
		3. Terpetakannya aliran peti kemas dan barang antara pelabuhan utama ke berbagai pelabuhan lainnya di pulau tujuan.	2011-2012	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag
		4. Meningkatnya keamanan untuk menekan risiko kerugian dalam angkutan barang.	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag • Kemenperin • Kemen-PU
8 .	Meningkatkan jumlah armada angkutan laut	Terbangunnya kapal nasional (armada nasional) untuk menunjang logistik antar pulau	2013-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag • Kemenperin • Kemen-PU
9 .	Mengembangkan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam rangka konektivitas lokal	1. Berkembangnya sungai yang potensial untuk transportasi sungai di pedalaman khususnya di Kalimantan untuk angkutan barang.  2. Restrukturisasi dan reformasi	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemendag • Kemenperin • Kemen-PU



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
		kelembagaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
		3. Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
		4. Terwujudnya kerjasama pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur pelabuhan dan sarana angkutan penyeberangan	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
10.	Meningkatkan kapasitas dan efektivitas pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.	1. Terwujudnya revitalisasi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, dan mekanisme PSO;	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
		2. Terwujudnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi dermaga sungai, danau dan penyeberangan	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li></ul>
		3. Meningkatnya pelayanan pada lintas penyeberangan di sabuk utara, sabuk tengah dan sabuk selatan	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen PU</li></ul>
11.	Mengurangi beban jalan secara bertahap dengan dan mengembangkan jaringan transportasi multimoda	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kapasitas jalan eksisting menuju Pelabuhan Laut	2012-2015	<b>Kemen-PU</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li></ul>
		2. Meningkatnya keterhubungan jaringan jalan nasional dan jaringan kereta api dengan pelabuhan laut dan bandar udara, yang merupakan jalur	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen-PU</li><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
		logistik utama		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li></ul>
		3. Meningkatnya kapasitas pelayanan jalan lintas Kabupaten;	2012-2015	<b>Kemen-PU</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemendagri</li></ul>
12.	Meningkatkan kelancaran angkutan barang dari pusat produksi menuju <i>oulet-inlet</i> ekspor impor dan antar pulau.	1. Meningkatnya kapasitas jalan pada lintas-lintas utama	2012-2015	<b>Kemen-PU</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li></ul>
		2. Meningkatnya kualitas jalan (lebar jalan dan kekuatan tekanan jalan) dan kelas jalan di wilayah rural, dan konektivitasnya dengan jaringan jalan kabupaten/kota	2012-2015	<b>Kemen-PU</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li></ul>
		3. Meningkatnya pembangunan jalan lintas di dalam 6 (enam) koridor ekonomi;	2012-2015	<b>Kemen-PU</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemenhub</li></ul>
		4. Meningkatnya jalan akses lokal antara pusat-pusat pertumbuhan dengan fasilitas pendukung (pelabuhan) dan dengan wilayah dalamnya, termasuk wilayah-wilayah non-koridor ekonomi;	2012-2015	<b>Kemen-PU</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemenhub</li></ul>
		5. Terbangunnya jaringan logistik darat antar lokasi perkebunan, sentra pengolahan, dan akses ke pelabuhan	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li><li>• Kementan</li></ul>
		6. Lancarnya aksesibilitas jalan untuk mengangkut produk peternakan	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li><li>• Kementan</li></ul>
		7. Meningkatnya dan berkembangnya akses ke daerah eksplorasi	2012-2015	<b>Kemen-PU</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen ESDM</li></ul>
		8. Terbangunnya jalan antara areal tambang dengan fasilitas pemrosesan	2012-2015	<b>Kemen-PU</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen ESDM</li></ul>
		9. Diperbaikinya akses jalan di perkebunan menuju <i>milling Sawit</i>	2012-2015	<b>Kemen PU</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kementan</li></ul>
		10. Meningkatnya kualitas infrastruktur untuk mendukung distribusi dan logistik migas	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li><li>• Kemen ESDM</li></ul>
		11. Tersusunnya jaringan infrastruktur transportasi logistik untuk kawasan Indonesia Timur, termasuk daerah perbatasan dan daerah terpencil, dan pedesaan	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen-PU</li><li>• Kemen PDT</li></ul>
		12. Dipersiapkannya Pembangunan Jembatan Selat Sunda: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rencana Induk Pembangunan jembatan Selat Sunda</li><li>• Ground breaking jembatan Selat Sunda</li></ul>	2012-2015	<b>Kemen PU</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemenperin</li></ul>
13.	Mengembangkan jaringan kereta api	1. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
	untuk angkutan barang jarak jauh di Sumatera, Jawa dan Kalimantan	perkeretaapian penumpang dan barang termasuk akses ke Bandara		• Kemen PPN/- Bappenas • Kemenperin
		2. Terlaksananya pembangunan jalur KA dengan akses langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemenperin
		3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas rel kereta api angkutan sawit	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kementeran
		4. Berkembangnya jaringan rel kereta api khusus batubara, menghubungkan antar lokasi pertambangan di pedalaman dengan pelabuhan;	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemen ESDM
		5. Terbangunnya jalur kereta api baru melalui peningkatan peran Pemda/Swasta/BUMN untuk peningkatan angkutan barang pada lintas-lintas potensial di Sumatera dan di Kalimantan.	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas • Kemen ESDM
14.	Meningkatkan kapasitas dan pelayanan KA	1. Berkembangnya angkutan kereta api dari/menuju pelabuhan/ terminal peti kemas, <i>dry port</i> dan sentra industri	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas
		2. Terlaksananya pembangunan <i>double track</i> jalur KA di Jawa	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas
		3. Terevitalisasinya jaringan kereta api yang sudah ada di Sumatera & Jawa baik untuk penumpang maupun untuk barang khususnya yang dapat mengakses Pelabuhan Laut, melalui kegiatan antara lain: Rehabilitasi jalur KA, Peningkatan jalur KA dan Reaktivasi jalur KA.	2012-2015	<b>Kemenhub</b> • Kemen BUMN • Kemen PPN/- Bappenas
15.	Mengoptimalkan peran bandara yang ada untuk dapat berfungsi sebagai Terminal Hub Kargo Internasional	1. Ditetapkannya dan ditingkatannya kapasitas Bandara Soekarno Hatta / Bandara Kualanamu sebagai hub kargo internasional di wilayah barat dan Bandara Makassar di wilayah timur dengan menerapkan manajemen logistik yang	2012-2015	<b>Kemen BUMN</b> • Kemenhub • Kemendag • Kemenkeu • Kemen PPN/- Bappenas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
		terintegrasi ( <i>integrated logistic cargo terminal management</i> );		
		2. Meningkatnya peran dan mengembangkan fasilitas bandara Denpasar, Jakarta, Surabaya, Makassar, Batam, Balikpapan, Biak, Pontianak, Yogyakarta, Medan, Palembang dan Manado sebagai bandara utama melayani kargo internasional dan domestik	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li></ul>
16.	Meningkatkan kapasitas dan pelayanan bandara	1. Meningkatnya pelayanan, bandara, angkutan udara dan penerbangan perintis	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li></ul>
		2. Meningkatnya kapasitas dan pelayanan beberapa bandar udara UPT untuk melayani kargo domestik ke dan dari daerah pedalaman	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li></ul>
		3. Meningkatnya pelayanan pengoperasian bandara sesuai dengan kebutuhan jaringan rute pergerakan pesawat udara kargo.	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li></ul>
17.	Mengembangkan jaringan transportasi multimoda	1. Ditetapkannya standar unitisasi dan dimensi untuk meningkatkan efisiensi alat angkut dan fasilitas pendukung operasional transportasi multimoda dan logistik.	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li></ul>
		2. Tersusunnya pedoman dan standarisasi dalam rangka mewujudkan kompatibilitas alat angkut dan fasilitas pendukung operasional transportasi multimoda dan logistik.	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li></ul>
		3. Terbangunnya terminal multimoda dan Pusat-Pusat Logistik ( <i>logistics centers</i> ) di Pelabuhan Laut utama.	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
		4. Terbangunnya terminal multimoda dan Pusat-Pusat Logistik ( <i>logistics centers</i> ) di Bandar Udara Pengumpul.	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li></ul>
		5. Terbangunnya sistem <i>short sea shipping</i> menggunakan sarana angkutan RoRo bagi <i>Container on Truck</i> di Pelabuhan Laut Utama dan Pelabuhan Laut Pengumpul, yang meliputi jenis RoRo, terminal multimoda, sarana bongkar muat, pusat logistik, dan sarana pengangkutan ke <i>hinterland</i> .	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li></ul>
		6. Terbangunnya sistem <i>short sea shipping</i> menggunakan sarana angkutan <i>Container on Barge</i> di Pelabuhan Laut Utama dan Pelabuhan Laut Pengumpul, yang meliputi jenis <i>Barge</i> , terminal multimoda, sarana bongkar muat, pusat logistik, dan sarana pengangkutan ke <i>hinterland</i> .	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li></ul>
18.	Percepatan dan peningkatan Implementasi transportasi multi moda	1. Terbangunnya jaringan transportasi multi moda di Pelabuhan Laut Utama, Pelabuhan Laut Pengumpul, Bandar Udara Utama, dan <i>Dry Port</i> .	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kementan</li><li>• Kemendagri</li><li>• Pemda</li></ul>
		2. Terbangunnya terminal multimoda untuk mendukung optimalisasi angkutan perintis dalam mendukung kelancaran arus barang di daerah terpencil /belum berkembang.	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemen PPN/- Bappenas</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kementan</li></ul>
		3. Terealisasinya revitalisasi sarana penunjang logistik angkutan barang dan pangan	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kementan</li><li>• Kemendagri</li><li>• Pemda</li></ul>
		4. Terimplementasikannya konsep angkutan multimoda di Pelabuhan Laut Utama, Pelabuhan Laut Pengumpul,	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
		Bandar Udara Utama, <i>Dry Port</i> .		
		5. Terbentuk kelembagaan transportasi multimoda (BUAM)	2012-2013	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li></ul>
		6. Berkembangnya beberapa <i>dry port</i> seperti Cikarang <i>dry port</i> sebagai terminal multimoda.	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li></ul>
		7. Pemberdayaan dan penguatan pelaku usaha yang menangani ataupun terkait dengan transportasi multimoda	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li></ul>

#### 4. RENCANA AKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rencana aksi teknologi informasi dan komunikasi periode 2011-2015 difokuskan kepada: 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan NSW dan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (*Customs Advance Trade System*); 2) Membangun e-Trade Logistics Nasional untuk melayani transaksi G2G, G2B dan B2B baik untuk perdagangan domestik maupun internasional; 3) Mengembangkan infrastuktur telekomunikasi dan *backbone* Teknologi Informasi dan Komunikasi; 4) Mengembangkan jejaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi Global sebagaimana disajikan pada Tabel 5.4. berikut.

**Tabel 5.4. Rencana Aksi Teknologi Informasi dan Komunikasi**

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
1.	Meningkatkan efektivitas pelayanan NSW dan KPPT/CATS	1. Terintegraskannya <i>inaportnet</i> , <i>inatrade</i> dan CATS dalam kerangka sistem NSW	2011-2012	<b>Kemenkeu/DJ BC</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemen BUMN</li><li>• BPOM</li><li>• Kemenkes</li><li>• Kementerian</li></ul>
		2. Meningkatnya akurasi informasi tentang arus barang (ekspor, impor, inter/intra-pulau)	2011-2012	<b>Kemenkeu/DJBC</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemendag</li><li>• Kementerian / Barantan</li></ul>
		3. Efektifnya implementasi e-Permit / e-license sehingga terwujud " <i>paperless based</i> "	2011-2012	<b>Kemenkeu /DJBC</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemen Kominfo</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
		"system"		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementan / Barantan</li><li>• Kemendag</li><li>• BPOM</li><li>• Kemenkes</li><li>• BKPM</li></ul>
		4. Optimalnya pengoperasian sistem <i>National Single Window</i> (NSW) dan KPPT/CATS di pelabuhan, Bandara dan <i>Dry Port</i> yang berfungsi sebagai Hub Internasional, pelabuhan utama dan Hub Logistik	2011-2015	<b>Kemenkeu/DJBC</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• KemenKominfo</li><li>• Kementan /Barantan</li><li>• Kemendag</li><li>• BPOM</li><li>• Kemen BUMN</li></ul>
2.	Membangun e-Logistics Nasional untuk melayani transaksi G2G, B2G dan B2B baik untuk perdagangan domestik maupun internasional	1. Berkembangnya lebih lanjut NSW dan KPPT/CATS menjadi NILITS untuk memperlancar dan meningkatkan perdagangan internasional dan perdagangan domestik  2. Terwujudnya e-Trade Logistics yang terintegrasi dengan NSW untuk melayani B2B dan B2G non-NSW baik untuk perdagangan Luar negeri (ASEAN dan Global) maupun perdagangan domestik  3. Terbangun pusat informasi ekspor secara online (ICT)	2011-2013  2012-2015  2012-2013	<b>KemenPPN/Bappenas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenkeu /BC</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemenkes</li><li>• BPOM</li><li>• Kementan /Barantan</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen Kominfo</li><li>• Setkab</li></ul> <b>KemenPPN/Bappenas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu /DJBC</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemen BUMN</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen Kominfo</li><li>• Kementan /Barantan</li><li>• Kemenkes</li><li>• BPOM</li><li>• Setkab</li></ul> <b>Kemendag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemen.KP</li><li>• Kementan</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen KUKM</li><li>• Kemenkominfo</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
		4. Beberapa BUMN dan/atau swasta melakukan investasi dan penyelenggaraan e-Trade Logistics	2011-2015	<b>Kemen BUMN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• KemenKominfo</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenhub</li></ul>
		5. Diberikannya insentif untuk mendorong penggunaan perangkat lunak dan aplikasi buatan Indonesia	2011-2013	<b>Kemenkominfo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemen BUMN</li></ul>
		6. Integrasi Sistem ICT BUMN yang terlibat dalam kegiatan <i>supply chain network</i> logistik nasional, meliputi : Pelabuhan, Bandara, <i>Forwarder, Shipper, Banking &amp; Insurance, Supplier, Producer</i> .	2012-2015	<b>Kemen BUMN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kementan</li><li>• Kemen KUKM</li><li>• Kemen KP</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemen ESDM</li><li>•</li></ul>
3.	Mengembangkan infrastuktur telekomunikasi dan <i>backbone</i> TIK	1. Terbangunnya jaringan ekstensi <i>backbone</i> dan <i>international exchange</i> hingga ke pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan utama pada setiap koridor ekonomi	2011-2013	<b>Kemenkominfo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen BUMN</li></ul>
		2. Terbangunnya sarana pendukung bagi penerapan konsep KPPT/CATS di kawasan industri atau di <i>dry port</i> atau <i>inland port</i> , untuk memaksimalkan fungsi pelabuhan sebagai pintu masuk/keluar barang	2011-2013	<b>Kemenkeu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenperin</li><li>• Setkab</li></ul>
		3. Tersedianya infrastruktur <i>backbone</i> , serat optik dan <i>e-Logistics Hub (messaging hub)</i> di pusat-pusat pertumbuhan pembangunan di setiap Koridor Ekonomi	2012-2015	<b>Kemenkominfo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemen BUMN</li></ul>
		4. Berkembangnya jaringan <i>broadband</i> terutama <i>fixed broadband</i>	2012-2015	<b>Kemenkominfo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemen BUMN</li></ul>
		5. Terintegrasinya <i>backbone</i> multimoda (serat optik, satelit, <i>microwave</i> ).	2012-2013	<b>Kemenkominfo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen BUMN</li></ul>
4.	Mengembangkan jejaringan	1. Terbukanya <i>link</i>	2015-2015	<b>Kemenkominfo</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

No.	Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
	Teknologi Informasi dan Komunikasi Global	<i>international gate way</i> baru ke luar negeri sebagai alternatif <i>link</i> yang ada;		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen BUMN</li></ul>
		2. Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana konektivitas regional dan global	2012-2013	<b>Kemenkominfo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen BUMN</li></ul>

### 5. RENCANA AKSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN MANAJEMEN

Rencana Aksi SDM dan Manajemen selama periode 2011-2015, difokuskan kepada: 1) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk menciptakan profesional di bidang logistik ; 2) Peningkatan peran lembaga pendidikan dan latihan, dan pembentukan kelembagaan logistik nasional sebagaimana disajikan pada Tabel 5.5. berikut.

**Tabel 5.5. Rencana Aksi SDM dan Manajemen**

No.	Program	Rencana Aksi	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
1.	Menata keilmuan, keahlian dan profesi logistik	1. Terbitnya SK pengkuhan Logistik sebagai bidang keilmuan dan keahlian (profesi) untuk diselenggarakan secara formal dan dikembangkan di Indonesia	2011-2012	<b>Kemenko-Ekon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendiknas</li><li>• Kemennakertrans</li></ul>
		2. Tersusunnya klasifikasi dan jenjang profesi logistik dan kompetensinya	2011-2012	<b>Kemendiknas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemennakertrans</li><li>• BNSP</li></ul>
		3. Tersusunnya kualifikasi khusus profesi logistik nasional sesuai dengan kondisi lokal dan nasional yang diberlakukan tanpa kecuali untuk semua PL dan PJL	2011-2012	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kemenko Ekon</b></li><li>• Kemenakertrans</li><li>• BNSP</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendiknas</li></ul>
		4. Terbitnya kebijakan dalam rangka sertifikasi <i>Professional Logistics and Supply Chain Management</i>	2011-2012	<b>Kemenko Ekon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendiknas</li><li>• Kemennaker</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendag</li><li>• BNSP</li></ul>
		5. Tertatanya sistem	2011-2012	<b>Kemendiknas</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

No.	Program	Rencana Aksi	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
		pendidikan dan pelatihan profesi logistik nasional		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemennaker</li><li>• BNSP</li></ul>
2.	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesional di bidang logistik	1. Terselenggarakannya pendidikan jalur akademik (Sarjana dan Pasca Sarjana) dan jalur terapan profesi logistik (Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Diploma)	2012-2015	<b>Kemendiknas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perguruan Tinggi</li><li>• Politeknik</li></ul>
		2. Terselenggaranya Diklat kompetensi profesi logistik untuk Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik	2012-2015	<b>Kemenko Ekon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemennaker</li><li>• BNSP</li><li>• Kemendiknas</li></ul>
		3. Terselenggaranya Diklat logistik baik untuk aparatur pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2012-2013	<b>Kemenko Ekon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemennaker</li><li>• Kemendiknas</li><li>• Kemendagri</li><li>• Pemda</li></ul>
		4. Terselenggaranya Diklat manajemen perpasaran untuk Pengelola Pasar Tradisional	2012-2013	<b>Kemendag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendagri</li><li>• Pemda</li></ul>
		5. Terselenggaranya Diklat SDM PJL ( <i>Freight Forwarding, warehouser, transporter, dll</i> )	2012-2015	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemennaker</li><li>• Kemendiknas</li><li>• Kemendag</li></ul>
		6. Terselenggaranya Pelatihan teknis kebijakan Perdagangan Luar Negeri bagi Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik	2012-2015	<b>Kemendag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementan</li><li>• Kemen.KP</li><li>• Kemenhut</li><li>• Kemenperin</li></ul>
		7. Meningkatnya pengetahuan pelaku logistik tentang proses kepabeanan/ <i>Customs Clearance</i>	2012-2015	<b>Kemenkeu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendag</li></ul>
		8. Diberikannya insentif kepada aparatur pemerintah maupun Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik untuk mendapatkan sertifikasi internasional	2012-2015	<b>BNSP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendiknas</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendag</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

No.	Program	Rencana Aksi	Target Waktu	Penanggung Jawab & Inst. Terkait
3.	Mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan profesional di bidang logistik	1. Didirikannya program studi logistik baik yang berorientasi keilmuan maupun terapan 2. Didirikannya lembaga pelatihan profesional di bidang logistik 3. Terbentuknya lembaga akreditasi dan sertifikasi lembaga pendidikan profesi logistik 4. Berkembang dan meningkatnya jejaring kerjasama antara lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah dan swasta, dan kerjasama dengan mitra luar negeri	2012-2015 2012-2015 2012-2015 2012-2015	<b>Kemendiknas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perguruan Tinggi</li><li>• Kementerian</li></ul> <b>Kemennaker</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendiknas</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendag</li></ul> <b>BNSP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendiknas</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendag</li></ul> <b>Kemendiknas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemennaker</li></ul>
4.	Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan logistik bertaraf internasional	1. Dibangunnya prasarana pendidikan dan pelatihan bertaraf internasional 2. Meningkatnya kuantitas dan kompetensi tenaga pengajar (Dosen, dan Instruktur) bertaraf internasional	2012-2015 2012-2015	<b>Kemendiknas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendag</li></ul> <b>Kemendiknas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemennaker</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemendag</li></ul>

## 6. RENCANA AKSI REGULASI

Fokus utama Rencana Aksi Regulasi periode 2011-2015 di arahkan kepada: 1) regulasi bidang usaha dan perdagangan; 2) regulasi bidang transportasi; 3) regulasi ekspor dan impor; 4) regulasi infomasi dan transaksi elektronik; 5) regulasi transportasi multi moda. Rencana aksi terkait regulasi sebagaimana disajikan pada Tabel 5.6. berikut.

**Tabel 5.6 Rencana Aksi Regulasi dan Kebijakan**

No	Rencana Aksi	Indikator	Tahun	Instansi terkait
1.	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan perdagangan	1. Selarasnya Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan perdagangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang logistik	2012-2015	<b>Kemenko Ekon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Setkab/Kemensetneg</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

No	Rencana Aksi	Indikator	Tahun	Instansi terkait
		2. Selarasnya peraturan perundangan di bidang perdagangan yang terkait logistik baik di pusat maupun di daerah	2012-2015	<b>Kemenko Ekon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Pemda</li><li>• Setkab/Kemensetneg</li></ul>
2.	Harmonisasi peraturan Bidang Ekspor- Impor	1. Selarasnya peraturan perundangan tentang pemeriksaan kepabeanan, Kementan /Barantan, BPOM dan lembaga penerbit perijinan lainnya	2012-2015	<b>Kemenko Ekon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Setkab/Kemensetneg</li></ul>
		2. Harmonisnya peraturan pelaksanaan untuk inspeksi di pelabuhan dan perbatasan	2012-2013	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenkumham</li></ul>
		3. Sinkronnya peraturan dan proses pemeriksaan barang ekspor dan impor yang dilakukan melalui <i>one stop service</i>	2012-2015	<b>Kemenkeu dan Kementan (Barantan)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Setkab/Kemensetneg</li></ul>
3.	Penyusunan Peraturan Perundangan dan kebijakan bidang Perdagangan	1. Ditetapkannya Undang-Undang Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya	2012-2014	<b>Kemendag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendagri</li><li>• KemenKominfo</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Setkab/Kemensetneg</li></ul>
		2. Penetapan tarif pelayanan jasa logistik dengan denominasi Rupiah.	2012-2013	<b>Kemenkeu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Setkab/Kemensetneg</li></ul>
4.	Penyusunan Peraturan Perundangan dan kebijakan bidang Ekspor-impor	1. Lengkapnya perangkat dan peraturan untuk pelaksanaan dari UU Kepabeanan	2012-2013	<b>Kemenkeu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Setkab/Kemensetneg</li></ul>
		2. Meningkatnya fasilitasi	2012-2015	<b>Kemendag</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

No	Rencana Aksi	Indikator	Tahun	Instansi terkait
		kemudahan impor dalam rangka menunjang ekspor		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Setkab/Kemensetneg</li></ul>
5.	Penyusunan Peraturan Perundangan dan kebijakan bidang Transportasi	1. Terbitnya peraturan pelaksanaan Undang- Undang di bidang Transportasi dan Pos yang terkait dengan logistik.  2. Terbitnya peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme partisipasi swasta dalam pengembangan sistem transportasi termasuk multimoda	2012-2013  2012-2015	<b>Kemenhub dan Kemenkominfo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Setkab/Kemensetneg</li></ul> <b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen.PU</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Setkab/Kemensetneg</li></ul>
6.	Penyusunan Peraturan Perundangan dan kebijakan bidang Multimoda	1. Dikeluarkannya kebijakan optimalisasi peran <i>dry port</i> yang sudah ada (Gedebage, Rambipuji, Solo Jebres, dan sebagainya) sebagai terminal multimoda  2. Ditetapkannya standar unitisasi dan dimensi untuk meningkatkan efisiensi alat angkut dan fasilitas pendukung operasional transportasi multimoda dan logistik.  3. Ditetapkannya pedoman dan standarisasi alat angkut dan fasilitas pendukung operasional transportasi multimoda dan logistik	2012  2012-2013  2012-2013	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemen.PU</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Setkab/Kemensetneg</li></ul> <b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen.PU</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Setkab/Kemensetneg</li></ul> <b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen.PU</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Setkab/Kemensetneg</li></ul>
7.	Penyusunan Peraturan Perundangan dan kebijakan bidang	1. Terbitnya peraturan yang mewajibkan pelaku jasa logistik untuk melaporkan statistik produksi logistik	2012	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenkominfo</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

No	Rencana Aksi	Indikator	Tahun	Instansi terkait
	TIK			<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen.PU</li><li>• Kemenkumham</li></ul>
		2. Tersusunnya kebijakan penerapan <i>cargo information system</i> dalam rangka meningkatkan keterpaduan transportasi multimoda	2012-2013	<b>Kemenhub</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemen.PU</li><li>• Kemenkumham</li></ul>
8.	Review dan Penyederhanaan prosedur eksport-impor	1. Terwujudnya prosedur pemeriksaan kepabeanan, Kementerian /Barantan, BPOM dan pemeriksaan lintas batas lainnya	2012-2013	<b>Kemenkeu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendag</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkes</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kementan</li></ul>
9.	Penyederhanaan prosedur Perdagangan	1.Terbitnya peraturan perdagangan menyangkut pelaku usaha (agen, distributor, importir, dll)  2.Perubahan secara bertahap penerapan <i>terms of trade</i> angkutan ekspor dari FOB menjadi C&F/CIF dan untuk angkutan impor dari C&F/ CIF menjadi FOB	2012-2015 2012-2013	<b>Kemendag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenkumham</li></ul> <b>Kemenkeu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenlu</li><li>• Kemenkumham</li></ul>

## 7. RENCANA AKSI KELEMBAGAAN

Fokus utama rencana aksi kelembagaan adalah peningkatan tata kelola pengembangan sistem logistik nasional baik dari sisi regulator maupun operator dan pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi pelaksanaan Pengembangan Sistem Logistik Nasional dilakukan oleh Komite Perecepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011-2025. Dalam pelaksanaan tugasnya KP3EI dibantu oleh Tim Kerja Logistik dan *Damage Control Unit* untuk mengawasi pelaksanaan Pengembangan Sistem Logistik Nasional dan menangani permasalahan di sektor logistik.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas tersebut, Tim Kerja ditugaskan pula untuk melakukan pengkajian dan merekomendasikan perlu atau tidaknya pemerintah membentuk institusi permanen yang menangani dan mengkoordinasikan Pengembangan Sistem Logistik Nasional dalam jangka menengah dan jangka panjang. Rencana aksi Kelembagaan disajikan pada Tabel 5.7. berikut:

**Tabel 5.7. Rencana Aksi Kelembagaan**

Rencana Aksi	Indikator	Target Waktu	Penanggung Jawab Instansi Terkait
--------------	-----------	--------------	-----------------------------------



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

1. Membentuk Tim Kerja Logistik	Terbitnya Keputusan Menko Perekonomian tentang Tim Kerja Logistik	2012	Kemenko Ekon
2. Membentuk Tim <i>Damage Control Unit</i>	Terbitnya Keputusan Menko Perekonomian tentang Tim <i>Damage Control Unit</i>	2012	Kemenko Ekon
3. Mempersiapkan alternatif bentuk kelembagaan logistik nasional yang permanen	Tersusunnya kajian dan rekomendasi mengenai alternatif bentuk kelembagaan logistik nasional yang permanen untuk jangka menengah dan panjang	2012-2013	Kemenko Ekon

**BIG WIN PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL**

Tabel 5.8. berikut merupakan *Big Win* yang ingin dicapai dalam rencana aksi Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang harus ditangani secara seksama dan komprehensif oleh berbagai pihak terkait.

**Tabel 5.8 Big Win Pengembangan Sistem Logistik Nasional**

<b>Tahap I (2011-2015)</b>	<b>Tahap II (2016-2020)</b>	<b>Tahap III (2021-2025)</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan dan pengembangan Pelabuhan Hub Laut Internasional di Kuala Tanjung dan Bitung (termasuk rencana rincinya), dan Pelabuhan Hub Udara Internasional di Jakarta, Kuala Namu, dan Makassar.</li><li>2. Terbangunnya Pelabuhan Kalibaru sebagai Perluasan Pelabuhan Tanjung Priok</li><li>3. Beroperasinya <i>Short Sea Shipping</i> di jalur perairan Pantura dan Jalintim Sumatera</li><li>4. Peningkatan peran kargo kereta api di Jawa dan Sumatera.</li><li>5. Pembangunan sistem otomasi dan informasi logistik nasional yang terintegrasi secara elektronik (INALOG)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbangunnya International Pelabuhan Hub Laut Internasional di Kuala Tanjung dan Bitung, dan pengembangan kargo udara di Manado, Bali, Balikpapan, Morotai dan Biak.</li><li>2. Terbangun dan terkoneksi jaringan transportasi multi moda antar pelabuhan hub internasional, pelabuhan laut utama, bandar udara utama, pusat-pusat pertumbuhan dan <i>dry port</i>.</li><li>3. Terbangunnya <i>Trans Java</i> dan <i>Trans Sumatera rail way</i></li><li>4. Pengoperasian e-Logistik yang terintegrasi dan terkoneksi dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Beroperasinya secara penuh Pelabuhan Hub Laut Internasional di Kuala Tanjung dan Bitung, dan pelabuhan hub kargo udara internasional</li><li>2. Efektifnya pengoperasian jaringan transportasi multi moda yang menghubungkan simpul-simpul logistik</li><li>3. Beroperasinya secara efektif angkutan Kereta api barang <i>Trans Java</i> dan <i>Trans Sumatera rail way</i> sebagai angkutan darat jarak jauh</li><li>4. Beroperasinya jaringan transportasi antar pulau secara efektif sehingga transportasi laut sebagai <i>backbone</i> transportasi</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Tahap I (2011-2015)	Tahap II (2016-2020)	Tahap III (2021-2025)
<ul style="list-style-type: none"><li>6. Peningkatan kapasitas angkut armada kapal perintis dan nasional untuk transportasi penumpang dan kargo di kawasan Timur Indonesia</li><li>7. Peningkatan ketersediaan, kualitas dan kapasitas angkutan laut antar pulau melalui pemberdayaan pelayaran nasional dan pelayaran rakyat.</li><li>8. Terbangunnya <i>logistics center</i> untuk melayani <i>consolidated container</i> bagi LCL cargo eksportir UKM</li><li>9. Beroperasinya model sistem pelayanan 24/7 kargo udara di Bandara Soekarno Hatta</li><li>10. Terwujudnya beberapa Penyedia Jasa Logistik Nasional sebagai pemain logistik klas dunia</li><li>11. Revitalisasi BUMN Niaga sebagai <i>Trading House</i> Komoditas Pokok dan Strategis serta Komoditas unggulan ekspor</li><li>12. Meningkatnya Peran BUMN (Pos, BGR dan Bulog) dalam Logistik Pedesaan</li><li>13. Terselenggaranya sistem pendidikan dan pelatihan profesi logistik nasional yang berstandar internasional</li><li>14. Terwujudnya Pusat Distribusi Regional Komoditas pokok dan Strategis pada setiap koridor ekonomi</li><li>15. Sinkronnya regulasi dan kebijakan yang mendorong efisiensi kegiatan ekspor impor</li><li>16. Penetapan tarif pelayanan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>jaringan ASEAN</li><li>5. Beroperasinya model sistem pelayanan 24/7 kargo udara di Bandara Utama</li><li>6. Peningkatan pangsa pasar Penyedia Jasa Logistik Nasional sebagai pemain logistik kelas dunia</li><li>7. Terwujudnya Pusat Distribusi Propinsi Komoditas pokok dan Strategis di Propinsi Konsumen</li><li>8. Peningkatan kemampuan PL dan PJL dalam membangun jaringan rantai pasok komoditas ekspor di pasar global.</li><li>9. Terwujudnya <i>Inland FTA</i></li><li>10. Pekerja logistik di Indonesia bersertifikasi logistiknasional yang berstandar internasional</li><li>11. Sinkronnya regulasi dan kebijakan antar sektor dan antar wilayah (pusat, daerah, dan antar daerah)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>nasional</li><li>5. Efektifnya pengoperasian jaringan transportasi multi moda yang menghubungkan simpul simpul logistik</li><li>6. Pelaku Logistik dan Penyedia Jasa Logistik Nasional menjadi pemain logistik kelas dunia yang handal</li><li>7. Tekoneksinya e-Logistik Nasional ke dalam Jaringan Logistik Global</li><li>8. Terwujudnya peraturan perundangan yang terunifikasi (UU Logistik Nasional) yang menjamin kelancaran arus barang secara efisien baik domestik maupun internasional</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

Tahap I (2011-2015)	Tahap II (2016-2020)	Tahap III (2021-2025)
jasa logistik dengan denominasi Rupiah 17. Efektifnya pengoperasian <i>Dry Port</i>		